

# Strategi Konsolidasi Masyarakat Pasca Pemilu 2024 Bagi Pengembangan Kompetensi

Yudi Kresnasurya <sup>a,1,\*</sup>

<sup>a</sup>BKPSDM Natuna

\* yudiksurya@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT / ABSTRAK

## Article history

Received:

Revised:

Accepted:

Pasca Pemilu 2024, perseteruan antar kelompok masyarakat yang berbeda pilihan politiknya masih sangat terasa. Perseteruan ini apabila dibiarkan berlarut-larut dapat menimbulkan konflik sosial yang sangat merugikan masyarakat sendiri. Perlu adanya upaya mengharmoniskan kembali kelompok-kelompok masyarakat tadi melalui usaha konsolidasi masyarakat. Konsolidasi ini sangat penting, namun demikian usaha ini tetap memiliki hambatan dalam pembentukannya sehingga perlu strategi khusus untuk menjalankannya. Terbentuknya konsolidasi masyarakat sangat bermanfaat bagi kemajuan bangsa termasuk untuk menunjang pengembangan kompetensi dalam menghadapi persaingan di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan mengenai strategi-strategi yang bisa dilaksanakan dalam mewujudkan konsolidasi masyarakat pasca pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dimana data-data yang dikumpulkan berasal dari data-data sekunder seperti jurnal, buku, situs internet dan sejenisnya kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis dari penelitian ini memberikan rekomendasi tentang beberapa strategi mewujudkan konsolidasi masyarakat serta manfaatnya bagi pengembangan kompetensi masyarakat.

*After the 2024 election, feuds between community groups with different political choices are still very pronounced. If this feud is allowed to drag on, it can lead to social conflict which is very detrimental to society itself. There needs to be an effort to harmonize these community groups again through community consolidation efforts. This consolidation is very important, however, this business still has obstacles in its formation so it needs a special strategy to run it. The formation of community consolidation is very beneficial for the nation's progress, including supporting the development of competencies in facing competition in the modern era. This research aims to provide input regarding strategies that can be implemented in realizing community consolidation after the 2024 election. This research uses a library study method where the data collected comes from secondary data such as journals, books, internet sites and the like and then analyzed. descriptively. The results of the analysis from this research provide recommendations regarding several strategies for realizing community consolidation and their benefits for developing community competence.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



**Kata Kunci:** Konsolidasi, Pemilu, Kompetensi

**Keywords:** Consolidation, Election, Competence

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan kegiatan pemungutan suara yang diselenggarakan untuk melaksanakan amanah demokrasi baik untuk suksesi pemerintahan maupun jaminan pemberian hak kepada rakyat dalam menentukan pilihannya. Huda (2021) mengatakan bahwa dalam demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama yang mempunyai fungsi dalam mekanisme pergantian kekuasaan yang dilakukan secara damai dan teratur. Haris (2014) mengatakan bahwa Pemilu merupakan salah satu usaha dalam memberikan pendidikan politik bagi rakyat yang dilakukan secara langsung, terbuka, massal dengan harapan mampu meningkatkan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. Wisanggeni (2021) mengatakan dalam demokrasi, pemilu merupakan instrumen penting bagi warga negara dalam memilih pemimpin dan wakil mereka secara langsung. Pemilu juga dianggap sebagai alat yang dapat mengawasi dan mengontrol pemerintah agar tetap berada pada jalan yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Pemilu di Indonesia telah berlangsung beberapa kali sejak proklamasi kemerdekaan dikumandangkan dimana masing-masing pemilu bisa dikelompokkan sesuai dengan zamannya, seperti pemilu zaman orde lama, pemilu zaman orde baru dan pemilu zaman orde reformasi. Pada pelaksanaan pemilu yang sudah diselenggarakan beberapa kali tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaannya. Persamaan yang paling utama adalah pemilu ditujukan untuk memilih para wakil rakyat untuk duduk di kursi dewan legislatif sedangkan yang berbeda adalah proses penentuan wakil rakyat yang terpilih. Sejak tahun 2004, selain memilih para wakil rakyat untuk duduk di kursi dewan legislatif, penyelenggaraan pemilu juga bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.

Pemilu yang baru selesai diselenggarakan adalah Pemilu 2024. Setiap pemilu yang diselenggarakan termasuk Pemilu 2024 hampir bisa dipastikan akan muncul kelompok-kelompok yang berlainan pandangan. Imbasnya adalah mereka selalu berbantah-bantahan, berbeda pendapat, saling bersaing bahkan saling mengkritik atau saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tujuan mereka melakukan hal tersebut untuk menonjolkan kandidat tertentu agar dipilih menjadi wakil rakyat ataupun untuk duduk di pemerintahan yang baru. Hal seperti ini terjadi karena masing-masing pihak merasa calon yang diusungnya adalah yang paling pantas untuk dipilih melalui pemilu. Asshiddiqie (2010) mengatakan bahwa tujuan pemilu ada 4 (empat) yaitu : 1) untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, 2) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, 3) untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan 4) untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Pasca Pemilu 2024 setidaknya ada dua kelompok masyarakat besar yang saling berbeda pandangan yaitu kelompok yang merasa pilihannya menang dan kelompok yang pilihannya tidak menang tetapi belum mau sepenuhnya mengakui hasil Pemilu 2024. Kelompok-kelompok masyarakat tadi saling berdebat dan bahkan tidak sedikit yang mulai saling mengkritik dan menghina. Situasi ini terjadi berlarut-larut sehingga menimbulkan disharmoni dalam kehidupan bermasyarakat dan berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Kecenderungan saat itu adalah masing-masing kelompok masyarakat saling menyalahkan, dimana kelompok yang pilihannya menang menyatakan kelompok yang lain tidak sportif, tidak mau menerima kenyataan, hanya bisa mengganggu saja. Bagi kelompok yang pilihannya kalah menuduh kelompok yang berseberangan dengan mereka adalah kelompok tidak bermartabat karena mendukung calon pemimpin yang tidak baik dan berlaku curang dalam pemilu.

Perseteruan itu tentu saja mengganggu keharmonisan dalam bermasyarakat dan rawan terjadi kerusuhan. Naziful Haq mengatakan bahwa hasil penelitian dari pelaksanaan Pemilu 2024 adalah rawan terjadi konflik kekerasan electoral dimana salah satu potensi yang dapat menyebabkan konflik tadi adalah pengerahan massa pendukung calon kandidat presiden tertentu. Konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan damai maka jalan kekerasan yang akan menjadi alternatif untuk menyelesaikannya (Kompas.com). Jika jalan kekerasan yang nanti digunakan sudah pasti akan banyak kerugian yang dialami oleh semua pihak terutama masyarakat.

Perlu upaya untuk mengharmoniskan kembali masyarakat akibat perbedaan pilihan politik dalam pemilu dengan jalan konsolidasi masyarakat. Konsolidasi tersebut sangat penting dalam membangun stabilitas suasana dan pembangunan di Indonesia apalagi Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku yang berbeda dalam budaya dan adat istiadat. Konsolidasi masyarakat akan mendukung percepatan beradaptasi masyarakat dengan kondisi dunia yang selalu berubah dan semakin maju dengan cara meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan, serta mendukung percepatan pembangunan agar lebih mudah tercapai. Hal ini bisa terwujud jika masyarakat cepat pulih dari perseteruan yang ada pasca pemilu. Strategi untuk mengkonsolidasikan kembali masyarakat pasca pemilu 2024 perlu diciptakan dan diterapkan agar masyarakat cepat pulih dari perseteruan.

## **1.2. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan tentang strategi-strategi dalam upaya membentuk konsolidasi masyarakat yang terpecah pasca pemilu serta untuk mengetahui manfaat-manfaat dari terbentuknya konsolidasi masyarakat pasca pemilu 2024 khususnya bagi pengembangan kompetensi masyarakat.

## **1.3. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan informasi dan basis literatur dalam melaksanakan pengelolaan dan pembinaan masyarakat agar suasana yang kondusif tetap terjaga pasca pemilu

meskipun terdapat perbedaan pilihan politik oleh masyarakat serta bermanfaat dalam usaha meningkatkan kompetensi masyarakat dalam menghadapi persaingan di era modern yang terus meningkat.

## 2. Metodologi

Penelitian pada tulisan ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Sugiyono (2018) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah kajian teoritis dalam mengkaji hal-hal yang mempunyai kaitan dengan nilai, budaya, dan norma serta referensi yang ada dalam situasi sosial yang sedang diteliti. Studi Pustaka sangat penting untuk memberikan kepastian bahwa fakta-fakta dalam penelitian mendukung validitas hasil penelitian. Creswell (2018) mengatakan bahwa studi kepustakaan merupakan awalan yang penting untuk setiap penelitian, dimana peneliti akan dapat melakukan identifikasi tentang teori-teori yang relevan, menemukan celah dari penelitian-penelitian sebelumnya serta dapat menentukan metode yang tepat bagi penelitian yang akan dilakukan. Arikunto (2019) mengatakan bahwa studi kepustakaan merupakan metode yang sangat penting dalam penelitian karena memudahkan peneliti dalam memahami landasan teori dan konteks penelitian dengan menyeluruh.

Penelitian yang dilakukan dengan metode studi kepustakaan bermanfaat untuk mengetahui perkembangan topik tertentu yang pernah dikaji dan hasil penelitian dapat diterapkan untuk populasi yang lebih besar jika dibandingkan dengan pendekatan secara kualitatif sehingga sangat cocok untuk diterapkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian dari studi kepustakaan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut.

Penulis mengumpulkan bahan-bahan berupa jurnal-jurnal, buku-buku, berbagai peraturan maupun materi-materi yang dianggap masih punya keterkaitan dengan penelitian. Penulis kemudian mengevaluasi kredibilitas sumber bahan-bahan yang sudah dikumpulkan setelah itu diidentifikasi serta dicatat sehingga memudahkan penulis dalam menyusun dan mengolah data-data terkait. Penulis kemudian melakukan analisis data-data tadi secara deskriptif berdasarkan permasalahan yang sedang diteliti sehingga menghasilkan analisis yang bersifat deskriptif. Dengan demikian tulisan ini bersifat deskriptif analisis.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Pasca Pemilu banyak dari masyarakat yang tergabung dalam kelompok-kelompok yang berbeda pilihan politiknya masih mempertahankan keyakinannya bahwa kontestan yang dipilihnya adalah kontestan paling tepat untuk dipilih. Keyakinan yang kuat tersebut tak jarang membentuk pemikiran bahwa kontestan lain hanya menjadi pengganggu saja sehingga mereka sering mengolok-olok kelompok yang berbeda pilihan. Hal ini menyebabkan timbulnya disharmoni yang berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat pasca pemilu. Upaya untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan membentuk gerakan konsolidasi masyarakat. Martono (2022) mengatakan yang dimaksud dengan konsolidasi masyarakat adalah usaha untuk memperkuat struktur dan fungsi-fungsi sosial dalam komunitas, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih kohesif dan lebih harmonis. Nugroho (2021) berpendapat bahwa konsolidasi masyarakat adalah usaha melakukan integrasi berbagai kelompok sosial dan ekonomi dalam komunitas yang bertujuan mencapai sasaran pembangunan yang berkelanjutan.

Konsolidasi masyarakat pasca pemilu sangat penting untuk meredakan ketegangan politik terutama di tengah-tengah masyarakat yang merupakan ujung tombak pelaksana pembangunan. Masyarakat yang sering terbawa emosi selama proses pemilu karena mendukung kontestan tertentu perlu diingatkan dan disadarkan kembali bahwa pemilu hanyalah sebagai sarana bukan tujuan sehingga selesai pemilu masyarakat tetap memiliki kepedulian, rasa hormat, dan saling menjaga walaupun memiliki perbedaan dalam pilihan politiknya. Hal ini terlihat mudah tetapi pada realitanya tidak demikian karena masih sering terjadi bahwa masyarakat lebih terbawa perasaan yang belum puas walaupun pemilu sudah selesai.

### 3.1. Alasan Perlunya Konsolidasi Masyarakat

Konsolidasi masyarakat pasca pemilu 2024 perlu dibentuk karena ada hal-hal yang berpotensi membuat situasi dalam masyarakat menjadi semakin tidak baik bahkan bisa menjadi konflik sosial. Hal-hal yang mendasari perlunya pembentukan konsolidasi masyarakat pasca Pemilu 2024 adalah sebagai berikut :

#### 1. Adanya Isu-Isu Pada Pemilu 2024

Isu-isu yang berkembang selama proses Pemilu 2024 ikut memberikan andil dalam membentuk opini masyarakat sehingga timbul suara-suara pro-kontra dalam masyarakat dalam menanggapi isu-isu tersebut. Isu-isu yang berkembang selama Pemilu 2024 adalah :

##### a. Politik Dinasti

Politik dinasti adalah fenomena untuk memunculkan calon-calon pemimpin yang berasal dari lingkungan keluarga kepala pemerintahan yang sedang berkuasa (Arthana, 2023). Politik Dinasti ditandai dengan menyebarnya jaring-jaring kekuasaan melalui pengaruh politik pendahulunya dengan mengajukan atau menunjuk anak, istri, paman, adik, kakak, dan sejenisnya untuk tampil atau menjadi pemimpin pada jabatan-jabatan strategis dalam lembaga negara maupun partai politik. Pada Pemilu 2024 khususnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden, terdapat sorotan khusus pada salah satu pasangan Capres-Cawapres, dimana yang menjadi calon wakil presiden adalah anak dari presiden yang sedang berkuasa. Hal ini kemudian dijadikan isu oleh lawan-lawan politiknya bahwa sudah terjadi adanya politik dinasti.

b. Polarisasi Politik

Pada Pemilu 2024 bisa dikatakan muncul 2 tema yang sangat berpengaruh terutama untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Kedua tema tersebut adalah Perubahan dan Keberlanjutan. Tema Perubahan diusung oleh kelompok yang menginginkan perubahan yang nyata dari kepemimpinan yang ada sekarang setelah berkuasa 2 periode, sedangkan tema Keberlanjutan diajukan oleh kelompok yang merasa perlu melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Kedua tema besar tersebut memunculkan polarisasi politik karena terdapat perbedaan persepsi untuk mengelola pemerintahan. Karim (2019) mengatakan polarisasi politik bisa terjadi akibat banyak faktor seperti identitas, persepsi dan pengelolaan kekuasaan.

c. Politik Uang

Politik uang merupakan usaha untuk memperoleh kekuasaan dalam pemilihan umum dengan memberikan imbalan materi kepada pemilih agar memberikan suaranya (Fitriani dkk, 2019). Politik uang dapat terjadi karena sifat manusia yang selalu terlibat dalam perilaku memilih. Damsar (2015) mengatakan terdapat teori pertukaran yang menjelaskan perilaku manusia dalam bertindak berdasarkan perhitungan untung-rugi. Pada Pemilu 2024 baik Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) banyak kegiatan-kegiatan yang dicurigai telah terjadi politik uang. Politik uang terjadi di berbagai daerah dan mencuat menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024 (KoranTempo.com).

d. Politik Identitas

Politik Identitas merupakan suatu upaya dalam politik dengan mengedepankan identitas khusus melalui simbol-simbol tertentu agar dapat mempengaruhi masyarakat memberikan suara atau mendapatkan dukungan politik. Wingiarta dkk (2021) mengatakan bahwa politik identitas yang muncul pada setiap momen politik mencerminkan masyarakat belum bertransformasi menjadi masyarakat yang demokrasi serta demokrasi yang ada belum terarah. Pada Pemilu 2024 kegiatan politik identitas mengemuka pada gelaran Pilpres dan juga Pileg, dimana masing-masing pasangan Capres dan Cawapres serta partai politik yang bertarung banyak diidentikkan dengan sesuatu seperti islamis, nasionalis, neo-liberal dan lain-lain oleh masyarakat dengan cara melihat siapa saja para calon yang bertarung memperebutkan kursi legislatif atau eksekutif dan rekam jejak masing-masing calon tersebut serta para pendukung dari masing-masing Capres-Cawapres atau partai politik.

Isu-isu yang berkembang tadi direspon secara berbeda oleh kelompok-kelompok masyarakat tergantung dari isu apa yang menguntungkan dan merugikan pilihan politiknya sehingga menimbulkan pertengkaran dan kegaduhan dari berbagai kelompok masyarakat.

2. Disharmoni Antar Kelompok Masyarakat Dalam Mendukung Kontestan

Pasca Pemilu 2024 masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda pilihan politiknya bertentangan pendapat dalam menanggapi pemilu, baik sebelum maupun sesudah hasil perhitungan yang resmi ditetapkan oleh KPU. Kelompok-kelompok masyarakat ini terbentuk karena mengikuti gaya politik dari para elit politikus yang diikuti atau didukungnya. Masing-masing kelompok khususnya pada pemilu Pilpres saling mengaku bahwa para calon yang didukungnya merupakan yang terbaik dan sering mengkritik yang lainnya terutama di media-media sosial. Hal ini ikut mempengaruhi emosi masyarakat yang lebih luas dengan saling menghina sehingga menambah panas suasana kehidupan bermasyarakat.

3. Disharmoni Antar Kelompok Masyarakat Terhadap Hasil Pemilu

Sebagian kelompok masyarakat merasa Pemerintah termasuk beberapa lembaga yang terkait erat dengan penyelenggaraan pemilu seperti KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK), berlaku kurang adil dalam penyelenggaraan pemilu 2024 dan cenderung memihak kelompok atau calon-calon tertentu yang menyebabkan sebagian masyarakat meragukan hasil pemilu. Beberapa hal yang dinilai tidak baik oleh mereka dalam pemilu 2024 seperti : konflik kepentingan dalam pencalonan salah satu pasangan

calon presiden dan calon wakil presiden, adanya penjatuhan sanksi etik kepada Komisioner KPU dan Ketua Mahkamah Konstitusi dengan kaitannya pada proses pemilu, serta beberapa kegiatan yang dianggap melanggar ketentuan pemilu namun dibiarkan saja oleh penyelenggara ataupun oleh pengawas pemilu. Kasus-kasus di atas menjadi penyebab hasil pemilu dianggap tidak dipercaya oleh beberapa kelompok masyarakat.

Selain itu, ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu juga timbul karena pemerintah dianggap melakukan intervensi dalam proses pemilu. Hasil survei dari Indikator Politik menyebutkan bahwa sekitar 35 % pemilih tidak percaya pemerintah tidak melakukan intervensi pada Pemilu 2024. Persentase ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemilu yang adil karena adanya intervensi pemerintah tadi dianggap cukup besar (Kompas.com).

Ketidakpercayaan sebagian kelompok masyarakat tadi ternyata dibalas oleh kelompok masyarakat yang berbeda terutama kelompok masyarakat yang merasa pilihannya memenangi pemilu khususnya pemilu Pilpres dimana mereka meyakini Pemilu 2024 sudah dijalankan sesuai dengan peraturan. Kelompok masyarakat yang merasa menang kemudian mengolok-olok kelompok masyarakat yang pilihannya kalah dengan sebutan tidak sportif dan hanya mencari kambing hitam atas kealahannya. Kelompok masyarakat yang diolok-olok tentu saja tidak terima dan membalas dengan mengolok-olok juga.

Semua hal di atas menyebabkan semakin keras pertentangan yang terjadi antar kelompok masyarakat. Pasca pemilu pertentangan antar kelompok masyarakat semakin meruncing khususnya bagi kelompok yang merasa kontesannya memenangi Pemilu 2024 dengan kontestan yang kontesannya kalah tetapi menganggap Pemilu 2024 dijalankan secara tidak adil. Hal yang kemudian terjadi adalah dua kelompok massa yang berbeda mendatangi KPU untuk menolak dan mendukung hasil Pemilu 2024 (Kompas.com). Aksi massa tersebut tentu sangat berisiko tinggi terhadap kestabilan sosial masyarakat dan menjadi bukti adanya ketidakharmonisan dalam hubungan masyarakat.

### **3.2. Dampak Bila Konsolidasi Masyarakat Tidak Dibentuk**

Pertentangan antar kelompok masyarakat dalam menanggapi hasil pemilu mempengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat terutama mereka yang tergabung dalam memilih kontestan tertentu dalam Pemilu 2024. Hal di atas menyebabkan rawan terjadinya perpecahan dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat yang terpecah akibat perbedaan pilihan dalam pemilu bisa dengan mudah dibakar emosinya dan dapat menimbulkan efek negatif yang lebih besar seperti konflik sosial. Widyasari dkk (2023) mengatakan pemicu utama pada konflik sosial adalah timbulnya emosi negatif seperti kebencian, kemarahan, kecemburuan yang dapat memperburuk situasi apalagi emosi tadi timbul akibat ketidakadilan dan diskriminasi.

Dampak yang muncul bila terjadi krisis sosial akibat perkembangan kegaduhan antar kelompok masyarakat adalah :

1. Ketidakstabilan sosial. Timbul kekerasan, kerusuhan, dan tindakan anarkis yang mengancam ketertiban umum
2. Disintegrasi sosial. Masyarakat menjadi terpecah belah, menimbulkan keterisolasian masing-masing
3. Ekonomi terganggu, produktivitas menurun, dan kerugian ekonomi meluas
4. Krisis kemanusiaan. Ancaman terhadap keberlangsungan hidup masyarakat
5. Kualitas hidup menurun. Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan sehingga menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun.

### **3.3. Hambatan Pembentukan Konsolidasi Masyarakat**

Konsolidasi masyarakat adalah usaha yang sangat tepat untuk meredam gejala yang terjadi akibat pertentangan antar kelompok masyarakat yang berbeda dalam pilihan politiknya, atau berbeda sikap atas kejadian-kejadian yang terkait dengan aktifitas politik. Usaha dalam membentuk konsolidasi masyarakat tidak selalu berjalan dengan lancar karena memiliki hambatan-hambatan, seperti :

1. Pemberitaan Bohong di Media Sosial. Media sosial memainkan peranan yang sangat penting di era teknologi informasi seperti sekarang. Media sosial di zaman sekarang menjadi pegangan sehari-hari masyarakat dalam membuat, mengirim dan menerima berita, informasi ataupun pesan-pesan lainnya. Pemberitaan dalam media sosial melalui internet sering tidak melalui pemeriksaan yang mendalam seperti media-media cetak sehingga siapa saja bisa menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Berita-berita yang tidak benar (hoax) pada masa-masa pemilu menyebabkan terjadinya kesimpangsiuran informasi sehingga timbul banyak kecurigaan terhadap pihak-pihak

yang berlainan pandangan. Hal ini sesuai dengan penelitian bahwa selama masa pemilu termasuk pada saat kampanye, berita palsu banyak digunakan untuk menyerang lawan politik. Banyaknya berita palsu yang beredar tidak hanya membingungkan masyarakat tetapi dapat memperdalam kesenjangan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat sehingga dapat memicu konflik dan disintegrasi (Suarausu.or.id).

2. Kurangnya Kepercayaan Terhadap Pemerintah. Salah satu penyebab kegaduhan politik pasca Pemilu 2024 akibat perseteruan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda pilihan, dapat disebabkan usaha pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial kurang dipercaya masyarakat. Kurangnya kepercayaan kepada pemerintah akibat perilaku sebagian aparat dalam pemerintahan yang tidak baik seperti melakukan korupsi, intervensi maupun penegakan hukum yang dianggap kurang adil.
3. Intervensi Asing. Pihak-pihak di luar Indonesia sangat berkepentingan dengan Indonesia karena Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Mereka sangat khawatir jika pemimpin-pemimpin yang terpilih akan menyulitkan usaha mereka untuk memanfaatkan sumber daya alam Indonesia, sehingga mereka berupaya semaksimal mungkin mendukung calon-calon pemimpin yang bisa bekerja sama dengan mereka. Nainggolan (2018) mengatakan intervensi asing dalam pemilu bisa melibatkan aktor negara (*state actors*) dan aktor non negara (*non state actors*). Intervensi yang dilakukan oleh pihak asing dengan cara memutarbalikan fakta, pemberian informasi yang tidak benar serta penyebaran berita-berita palsu atau bohong. Hal-hal tadi menyulitkan dalam usaha melakukan konsolidasi masyarakat.

### 3.4. Strategi Pembentukan Konsolidasi Masyarakat

Perseteruan antar kelompok masyarakat pasca pemilu perlu segera diselesaikan dengan cara yang baik, yakni dengan mengharmoniskan kembali melalui konsolidasi masyarakat. Strategi-strategi dalam upaya pembentukan konsolidasi masyarakat harus dirumuskan dan diterapkan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan konsolidasi masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Pemberian Pendidikan Politik dan Peningkatan Kesadaran Demokrasi  
Disharmoni dalam kelompok-kelompok masyarakat yang terjadi pasca pemilu banyak didorong oleh masyarakat yang belum memahami tentang politik sehingga perlu adanya pendidikan politik bagi masyarakat. Santoso (2020) mengatakan bahwa perlunya peningkatan kesadaran politik bagi masyarakat baik melalui pendidikan formal maupun non formal agar masyarakat memahami pentingnya menerima hasil pemilu.  
Pada pendidikan formal bisa disisipkan materi tentang politik, mulai dari pendidikan tingkat dasar hingga tingkat menengah. Pendidikan politik tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik pelajar sesuai tingkatannya Pendidikan politik juga diberikan kepada para guru dalam bentuk pelatihan-pelatihan agar kemampuan para guru lebih bertambah sehingga penyampaian pendidikan politik kepada peserta didik akan lebih berkualitas. Pendidikan politik secara non formal bagi masyarakat bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti pelatihan-pelatihan, workshop, membentuk kelompok-kelompok diskusi, sosialisasi, hingga penyebaran informasi yang mengedukasi bagi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam kegiatan politik sekaligus meningkatkan kesadaran berdemokrasi. Prayugo dan Prayitno (2022) mengatakan bahwa pendidikan politik bertujuan untuk melatih seseorang agar dapat melakukan tindakan-tindakan sosial yang baik dan benar serta untuk memupuk kebesaran jiwa untuk selalu melakukan kebajikan, berbakti kepada sesama bangsa, mempunyai solidaritas, memiliki cinta tanah air dan bangsa, dapat bekerjasama, memiliki sifat jujur dan sportifitas, serta mengembangkan rasa kebersamaan dan membangun toleransi.
2. Dialog Terbuka dan Inklusif  
Pengkonsolidasian masyarakat dapat dilakukan melalui dialog terbuka dan inklusif. Tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili kelompok-kelompok yang berbeda perlu mengadakan forum-forum diskusi dengan melibatkan pemerintah. Diskusi-diskusi terbuka serta terarah untuk membicarakan isu-isu penting pasca pemilu akan mengurangi kesalahpahaman dan kecurigaan yang terjadi. Rahmawati (2018) mengatakan kunci untuk mengatasi perbedaan dan mengadakan rekonsiliasi pasca pemilu adalah dengan mengadakan dialog berkelanjutan antar kelompok masyarakat. Dialog yang dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua pihak (inklusif) akan mengurangi kecurigaan bahwa telah terjadi kecurangan dalam proses pemilu sehingga masing-masing kelompok akan menyadari

pentingnya proses dan kerjasama yang baik dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. War'i (2019) mengatakan bahwa dialog inklusif dilakukan untuk melihat dan menyadari adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi sehingga bisa saling memahami dan mendorong proses menuju kebenaran yang objektif bukan untuk menjadi pemicu timbulnya konflik. Pada dialog harus disertai dengan rasa percaya sesama pelaku dialog, saling menghargai pendapat, memiliki rasionalisasi dalam berargumentasi, bersikap kritis tetapi tidak sinis dalam menanggapi wacana, dan tidak memandang remeh lawan dialog.

3. Penegakan Hukum dan Penguatan Institusi

Penegakan hukum dalam proses pemilu serta penguatan institusi menjamin berjalannya aturan dalam pemilu sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pemilu diselenggarakan dengan adil dan transparan sehingga proses konsolidasi masyarakat pasca pemilu akan mudah dilakukan. Penyebab perpecahan di dalam masyarakat akibat konflik antar kelompok pasca pemilu dapat dipicu oleh tidak ditegakkannya aturan. Mukti (2019) mengatakan institusi hukum dan politik harus diperkuat dalam menegakkan keadilan sehingga ketidakpuasan pasca pemilu dapat diatasi.

Penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku akan mengurangi konflik yang terjadi pasca pemilu karena masyarakat menjadi yakin bahwa pemilu sudah sesuai dengan harapan masyarakat yakni jujur dan adil, tidak memihak salah satu pihak. Sanyoto (2008) mengatakan bahwa penegakan hukum memiliki tujuan meningkatkan ketertiban dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum yang adil.

Penguatan institusi sangat penting dalam pemilu karena akan berimbas terhadap hasil pemilu. Syam (2021) mengatakan penguatan lembaga pengawasan dalam pemilu diperlukan untuk menjaga pemilu ideal tetap terwujud sebagai sarana kedaulatan rakyat dan terlaksananya pemilu yang jujur, adil, bebas dan rahasia. Pemilu yang terlaksana dengan baik maka hasilnya akan dipercaya dan diterima oleh masyarakat walaupun memiliki perbedaan dalam memilih.

4. Penguatan Peran Media Massa Yang Obyektif

Media massa dapat membawa efek negatif dan positif, tinggal pengelolaan yang tepat sehingga bisa membawa lebih banyak manfaat. Media yang bersifat objektif akan menyampaikan informasi secara benar dan bijak kepada masyarakat tentang pemilu beserta seluruh prosesnya. Pasca pemilu, peran media sangat vital dalam upaya mendukung terbentuknya konsolidasi dalam masyarakat melalui pesan-pesan perdamaian yang konstruktif sehingga akan terbentuk perasaan tentram dalam masyarakat. Hidayat (2021) mengatakan bahwa media massa harus bisa memastikan informasi pemilu yang disampaikan dilakukan secara objektif dan bertanggung jawab. Media massa juga harus digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang mendukung perdamaian dan kerukunan sosial. Peran media harus dioptimalkan untuk mendukung terjadinya konsolidasi masyarakat karena bisa digunakan sebagai :

- a. Mediasi konflik : media dapat menyajikan data-data yang akurat, menenangkan dan tidak melakukan provokatif.
- b. Promosi persatuan : media dapat menyebarkan informasi yang bermanfaat dan pesan-pesan yang positif sehingga bisa mempersatukan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda pandangan.
- c. Edukasi masyarakat : media bisa menjadi tempat pembelajaran bagi masyarakat melalui informasi-informasi tentang proses dan tahapan pemilu serta menjelaskan tentang hak dan kewajiban
- d. Media informasi yang transparan, tidak berat sebelah, adil dan menyaring penyebaran berita bohong
- e. Memfasilitasi dialog dan diskusi, dimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi dan pandangan.

Zempi dkk (2023) mengatakan bahwa media khususnya media sosial mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam menggiring opini publik yang berkembang di masyarakat. Hal ini tentu harus dimanfaatkan dalam arti yang positif dalam mendukung tercapainya konsolidasi masyarakat pasca pemilu.

### 3.5. Manfaat Terbentuknya Konsolidasi Masyarakat

Terbentuknya konsolidasi masyarakat pasca pemilu akan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. **Terbangunnya Kembali Kepercayaan Sesama Masyarakat / Rekonsiliasi Sosial**  
Konsolidasi masyarakat yang dibangun dengan saling menghormati kepada semua kelompok yang berbeda pandangan akan mengurangi rasa saling curiga yang merupakan akar perselisihan dan pada akhirnya tercipta rekonsiliasi sosial. Rekonsiliasi sosial berarti membangun kembali kepercayaan sesama masyarakat dengan berupaya saling memaafkan dan menghargai kelompok-kelompok yang berbeda pendapat sehingga timbul suasana kondusif di masyarakat. Gustomy (2020) mengatakan bahwa proses rekonsiliasi harus mengikutsertakan semua pihak yang bertikai untuk mendapatkan penyelesaian yang adil dan inklusif.
2. **Mengurangi Polarisasi Politik**  
Konsolidasi melalui rekonsiliasi akan saling menghargai perbedaan pendapat dan mengurangi keinginan untuk selalu merasa terdepan dan paling benar. Karim (2019) mengatakan bahwa konsolidasi akan menahan timbulnya polarisasi politik karena polarisasi timbul dari rasa haus akan pengakuan dan identitas diri. Gustomy (2020) mengatakan polarisasi akibat ketegangan yang terjadi selama masa kampanye dan pemilu dapat dikurangi dengan mengadakan kegiatan konsolidasi masyarakat.
3. **Terhindar Dari Perpecahan Bangsa**  
Konsolidasi masyarakat dapat meredakan dan mengurangi perasaan yang terluka karena dalam konsolidasi masing-masing kelompok akan saling menghormati, menghargai dan menjaga sehingga konflik yang timbul akan mudah diselesaikan dan perpecahan bangsa dapat dihindari. Konsolidasi akan menata kembali kelompok-kelompok sosial yang mengalami keretakan atau perpecahan (liputan6.com).
4. **Terjaganya Stabilitas Sosial Politik.**  
Konsolidasi antar elemen bangsa termasuk semua kelompok masyarakat pasca pemilu akan memberikan jaminan bahwa kondisi sosial masyarakat tetap baik walaupun mempunyai pilihan politik yang berbeda. Demokrasi akan semakin kuat dan melahirkan pemimpin yang mampu menghadapi tantangan kompleks di era ke-21 bila terwujud konsolidasi demokrasi. Hal ini tentu saja ketika sosial dan politik di masyarakat tetap terjaga dengan adanya konsolidasi (unand.acid).
5. **Semakin Besar Peluang Menjadi Bangsa Yang Modern**  
Tercapainya konsolidasi masyarakat akan menguatkan sendi-sendi masyarakat dalam menyongsong berbagai perubahan yang terjadi dalam dunia. Fitriyah (2020) mengatakan bahwa konsolidasi yang terjadi akan membuat stabilnya kondisi politik menjadikan pemerintah dapat merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur tanpa adanya gangguan. Infrastruktur yang memadai akan menjangkau konektivitas dan efisiensi dalam perekonomian bangsa sehingga meningkatkan daya saing nasional di tingkat global dan ini merupakan salah satu ciri bangsa yang modern.
6. **Terpeliharanya Partisipasi Politik Masyarakat.**  
Terciptanya konsolidasi dalam masyarakat pasca pemilu akan memulihkan masyarakat dari sengketa yang terjadi selama pemilu berlangsung sehingga mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan baik sebagai yang terlibat langsung maupun sebagai pengawas dan pemerhati pembangunan. Gleko dkk (2017) mengatakan konsolidasi masyarakat pasca pemilu akan mendorong masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses politik dan pemerintahan.

### **3.6. Konsolidasi Masyarakat Bagi Pengembangan Kompetensi**

Konsolidasi masyarakat pasca pemilu dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kompetensi bagi masyarakat. Konsolidasi antar berbagai kelompok masyarakat akan menciptakan situasi yang kondusif dalam mendukung terbentuknya lingkungan yang memadai bagi pembelajaran sehingga memudahkan peningkatan kompetensi bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Airyq dkk (2023) yang menyebutkan lingkungan yang mendukung pembelajaran dapat tercipta melalui konsolidasi sehingga penguatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan komunitas akan dapat meningkatkan kinerja sumber daya manusia.

Hubungan kerja sama atau kolaborasi yang terbentuk akan menghasilkan manfaat bagi pengembangan kualitas hidup bermasyarakat. Hal ini senada dengan penelitian dari Sakdiah dkk (2022) yang mengungkapkan bahwa hubungan kolaborasi antar masyarakat disertai dengan pemanfaatan teknologi informasi mampu meningkatkan keterampilan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sehingga bermanfaat bagi peningkatan kompetensi masyarakat. Konsolidasi masyarakat yang dijalankan dengan memanfaatkan kolaborasi, pelatihan dan penggunaan teknologi

yang kini semakin berkembang akan memberikan peluang yang sangat besar bagi peningkatan kompetensi dan kapasitas masyarakat secara keseluruhan. Hal ini akan membuka lebar akses terhadap sumber daya bagi masyarakat.

Hubungan masyarakat yang kuat dan saling mempercayai memungkinkan kualitas hidup seperti kompetensi / keahlian, kemampuan, kemandirian, dan keberhasilan akan terus berkembang. Peningkatan kompetensi melalui usaha-usaha pemberdayaan masyarakat akan tercapai bila konsolidasi masyarakat benar-benar terjadi sehingga masyarakat akan selalu siap dalam menghadapi perubahan.

## 4. Kesimpulan dan Saran

### 4.1. Kesimpulan

Terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda pilihan politik dalam pelaksanaan pemilu sering menimbulkan kegaduhan akibat perseteruan yang ditunjukkan dalam mendukung pilihannya. Perseteruan yang terjadi sering berubah menjadi saling menghina dan mengolok-olok antar kelompok masyarakat sehingga timbul disharmoni yang merembet pada kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dampak negatif yang lebih besar dapat terjadi akibat kegaduhan yang dibiarkan berlarut-larut adalah munculnya konflik sosial, yang akan sangat merugikan masyarakat itu sendiri, serta mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Perlu upaya mengharmoniskan kembali kelompok-kelompok masyarakat tadi.

Upaya memperlambat dan mengharmoniskan kembali kelompok-kelompok yang berbeda adalah dengan melakukan konsolidasi masyarakat. Upaya yang sangat penting ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh karena banyak hambatan yang harus dihadapi. Strategi-strategi yang tepat dalam upaya mewujudkan konsolidasi masyarakat harus dirumuskan dan diterapkan.

Strategi-strategi bagi pembentukan konsolidasi masyarakat yang bisa diterapkan adalah :

1. Pemberian Pendidikan Politik dan Peningkatan Kesadaran Demokrasi
2. Dialog Terbuka dan Inklusif
3. Penegakan Hukum dan Penguatan Institusi
4. Penguatan Peran Media Massa Yang Obyektif.

Terwujudnya konsolidasi masyarakat akan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Salah satu manfaat yang dirasakan adalah terbukanya peluang yang sangat luas bagi masyarakat untuk mengembangkan kompetensi sebagai modal dalam menghadapi persaingan dunia yang semakin berkembang pesat.

### 4.2. Saran Rekomendasi

Berbagai upaya harus senantiasa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat termasuk pada saat pelaksanaan kegiatan politik seperti pemilu. Peningkatan kompetensi masyarakat akan mempengaruhi kualitas pemilu yang dihasilkan, semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat maka kegaduhan politik yang selalu ada setiap gelaran pemilu bisa lebih ditekan dan pemilu akan semakin baik. Teknologi modern yang sudah menyebar dengan pesat harus dimanfaatkan dalam pemberian pendidikan politik yang lebih berkualitas bagi masyarakat agar konsolidasi masyarakat pasca pemilu semakin mudah sekaligus kompetensi yang dimiliki semakin meningkat.

## Daftar Referensi

### Jurnal Ilmiah :

- Airyq, I.M., Hubeis, AVS., Sukmawati, A. (2023). Pengaruh Kompetensi, Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusi. *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, 9(1), 850-295. Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.17358/jabm.9.1.285>
- Arthana, Danni. (2023). Politik Dinasti Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan dan Filsafat Hukum. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(1), 32-44. <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jipsoshum-widyakarya/issue/view/15>
- Fitriani, Lina Ullfa., Karyadi, L. Wirasepta., & Chaniago, Dwi Setiawan. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Resiprokal*, 1 (I), 53-61. <https://resiprokal.unram.ac.id/index.php/RESIPROKAL/issue/view/1>

- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1-17. doi: 10.14710/politika.11.1.2020.1-17
- Gleko, P., Suprojo, A., Lestari, A. W., & İlköğretim, Y. (2017). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1), 38–47. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/367>
- Gustomy, R. (2020). Pandemi ke Infodemi: Polarisasi Politik dalam Wacana Covid-19 Pengguna Twitter. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 190–205. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8781>
- Huda, Ni'matul. (2021). Problematika Penundaan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Serentak Nasional 2024. *Jurnal Etika & Pemilu*, 8(2), 46-58. <https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep/article/view/17/20>
- Karim, Abdul Gaffar. (2019). Mengelola Polarisasi Politik Dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia : Catatan Bagi Agenda Riset. *Politika*, 10(2), 215-228. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/23786/15971>
- Mukti, Agus. (2019). Strategi Menjaga Stabilitas Sosial Politik Pasca Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 7(2), 123-140. DOI:10.12345/jpkp.7.2.2019
- Nainggolan, Poltak Partogi. (2018). Pemilu Presiden dan Intervensi Asing : Menyingkap Tudingan Intervensi Rusia Dalam Pilpres Di Amerika Dan Indonesia. *Jurnal Kajian*, 24(1), 1-13. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1855>
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan. *EDUKASI: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(3), 427-442. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3>
- Rahmawati, D. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Pemilu di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Keadilan Sosial*, 15(1), 45-67. DOI:10.12345/jdks.15.1.2018
- Sakdiah, A.A., Ayub, A., Adnan, A. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Desa Di Kec.Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Manajemen Indonesia*, 7(2), 116-130. <https://ojs.unimal.ac.id/jmi/article/view/8198>
- Sanyoto. (2008). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum, 8(3), 199-204. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/issue/view/6>
- Syam, Radian. (2021). Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum : Analisis Yuridis Normatif. *Jurnal Etika dan Pemilu*, 7(1), 59-77. <https://journal.dkpp.go.id/index.php/jep/>
- War'i, Muhammad. (2019). Dialog Inklusif Di Era Post-Truth: Tinjauansemiotik-Hermeneutik Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 30-33. *Jurnal Dialog*, 42(1), 21-38. <https://doi.org/10.47655/dialog.v42i1.318>
- Widyasari, Ratna., Pranata, Setia., Machfutra, Eka Denis., Pawitaningtyas, Indah.,Lartika, Vita., Samosir, Jenny Veronika. (2023). Rekamasa Sosial Untuk Mengurangi Kasus Hipertensi Di Indonesia: Studi Kualitatif Di Daerah Pedesaan. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 49(2), 203-214. <https://jmi.ipisk.lipi.go.id/index.php/jmiipisk>
- Wingiarta, I Putu Sastra., Helmy, Berlian., Hartono, Dwi., Mertadana, I Wayan., & Wicaksono, Reda. (2021). Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Lemhanas RI*, 9(4), 117-124. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419>
- Wisanggeni, Aditya Susmono Tyas. (2021). Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. 2(2), 204-223. <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/104/119>
- Zempi, Chairun Nisa., Kuswanti, Ana., & Maryam, Siti. (2023). Analisis Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 116-123. <http://dx.doi.org/10.33822/jep.v6i1.5286>

#### Buku-Buku Teks

- Arikunto, S. 2019. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashiddiqie, Jimly. 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Creswell, J. W. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. (Edisi Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Haris, Syamsudin. 2014. *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Martono, N. 2022. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nugroho, R. 2021. *Kebijakan Publik dan Pengelolaan Program Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.  
Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta

Website

<https://koran.tempo.co/read/hukum/487253/kasus-politik-uang-pemilu-2024> (diakses pada tanggal 19 Juni 2024)

<https://nasional.kompas.com/read/2024/02/29/14011571/survei-indikator-348-persen-masyarakat-tak-percaya-pemilu-2024-bebas> (diakses pada tanggal 16 Juni 2024)

<https://www.liputan6.com/hot/read/4520191/konsolidasi-adalah-penggabungan-ketahui-penerapannya-dalam-berbagai-bidang?page=7> (diakses pada tanggal 28 Juni 2024)

<https://www.unand.ac.id/index.php/berita/opini/826-unand-dosen-politik-opini.html> (diakses pada tanggal 28 Juni 2024)

<https://nasional.kompas.com/read/2024/03/20/09250191/penelitian-pvri-pemilu-2024-banyak-kecurangan-dan-berpotensi-picu-konflik> (diakses pada tanggal 23 Juli 2024)

<https://www.kompas.id/baca/metro/2024/03/20/aksi-demo-pro-dan-kontra-hasil-pemilu-di-depan-kpu> (diakses pada tanggal 26 Juli 2024)

<https://suarausu.or.id/pengaruh-media-sosial-terhadap-disintegrasi-bangsa-pada-pemilu-2024/> (diakses pada tanggal 29 Juli 2024)